



ABENOMICS, DIPLOMASI EKONOMI DAN EKSPOR INFRASTRUKTUR JEPANG DI INDONESIA

Nurul Aulia^{1*} Lucyana Kumala¹

¹ Program Studi Hubungan Internasional; Universitas Sriwijaya; Indonesia

*email: aulia22nurul@fisip.unsri.ac.id

Abstract

The export of infrastructure from Japan under Shinzo Abe's leadership has been the subject of several studies. Nevertheless, previous research has not extensively examined the Japanese export infrastructure initiatives in Indonesia from the perspective of economic diplomacy analysis. The article employed qualitative methodologies by utilizing a case study technique. The data sources utilized in this study encompass both primary and secondary sources. The study employed the theoretical framework of Maiike Okano-Heijman's Economic Diplomacy, which encompasses three primary components: commercial diplomacy, trade diplomacy, and economic/development assistance. These pillars were utilized to evaluate a specific case study.

Keywords: *Abenomics, economic diplomacy, infrastructure, Japan, Indonesia*

Abstrak

Beberapa studi telah mengkaji tentang kebijakan ekspor infrastruktur Jepang di masa pemerintahan Shinzo Abe. Meskipun demikian, studi yang ada belum mendalami secara spesifik tentang upaya ekspor infrastruktur Jepang di Indonesia dalam kerangka analisis diplomasi ekonomi. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menelaah tentang bagaimana Jepang, di bawah pemerintahan Shinzo Abe, menjalankan diplomasi ekonominya di Indonesia untuk mewujudkan ekspor infrastruktur di bawah *Abenomics*. Penelitian yang dilaporkan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus dengan sumber data primer dan sekunder. Studi ini menggunakan landasan teori dari Diplomasi Ekonomi Maiike Okano-Heijman yang terdiri atas tiga pilar utama yakni diplomasi komersial, diplomasi perdagangan dan bantuan ekonomi/pembangunan untuk menganalisis studi kasus.

Kata Kunci: Abenomics, diplomasi ekonomi, infrastruktur, Jepang, Indonesia

Pendahuluan

Pada periode kepemimpinan Perdana Menteri Shinzo Abe (2012-2020), Jepang menerapkan seperangkat kebijakan ekonomi yang bernama “*Abenomics*”. Shinzo Abe pertama kali menuturkan kebijakan *Abenomics* secara resmi dalam pidatonya sebagai Perdana Menteri Jepang di depan majelis Diet pada tahun 2013. Dalam pidato tersebut, Shinzo Abe mendeklarasikan tujuannya untuk membangkitkan kembali ekonomi Jepang dengan tiga ‘panah’ utama yaitu: (1) kebijakan moneter yang lebih agresif; (2) kebijakan fiskal yang lebih fleksibel; (3) strategi pertumbuhan ekonomi dengan mendorong investasi dari sektor swasta (*Official Website of the Prime Minister of Japan and His Cabinet*, 2013b).

Dalam sebuah dokumen yang dirilis pada Juni 2013 dengan judul “*Japan Revitalisation Strategy–Japan is Back*”, dituliskan bahwa salah satu strategi revitalisasi ekonomi Jepang adalah dengan meningkatkan ekspor infrastruktur Jepang di pasar internasional (*Official Website of the Prime Minister of Japan and His Cabinet*, 2013a). Upaya peningkatan ekspor infrastruktur Jepang ini adalah salah kebijakan dari panah ketiga *Abenomics*, yaitu strategi pertumbuhan ekonomi dengan mendorong investasi dari sektor swasta. Kabinet Shinzo Abe mengumumkan bahwa Jepang menargetkan peningkatan penjualan ekspor infrastruktur dari 10 triliun yen pada 2010 menjadi 30 triliun yen pada tahun 2020 (*Official Website of the Prime Minister of Japan and His Cabinet*, 2014). Optimisme ini dilandaskan oleh meningkatnya permintaan pada proyek infrastruktur di berbagai negara. Salah satu target pasar ekspor infrastruktur Jepang adalah Asia Tenggara. Federasi Bisnis Jepang atau lebih dikenal sebagai *Keidanren* menerbitkan sebuah *policy proposal* di tahun 2015 terkait prioritas kawasan untuk pasar infrastruktur Jepang dan diantaranya adalah negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia (*Keidanren*, 2015).

Terdapat tiga pandangan berbeda pada literatur tentang diplomasi ekonomi dan ekspor infrastruktur Jepang di kawasan Asia-Pasifik. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Kikuchi & Unzaki (2019) menganalisis tren peningkatan investasi infrastruktur Jepang di kawasan Asia Tenggara dan berargumen bahwa tujuan dari investasi infrastruktur ini adalah untuk kepentingan ekonomi, yaitu meningkatkan konektivitas rantai pasok perusahaan multinasional Jepang di Asia. Kedua, beberapa literatur yang membahas tentang kebijakan ekspor infrastruktur Jepang secara bilateral maupun

multilateral di Asia-Pasifik berargumen bahwa tujuan utama Jepang adalah untuk menguatkan pengaruh politiknya di kawasan Asia dan sebagai tindakan reaktif atas kebangkitan Cina (Anam & Ristiyani, 2018; Jiang, 2019; Yoshimatsu, 2018; Zhao, 2018). Ketiga, pandangan dari Suzuki (2021) yang melihat bahwa klaim atas rivalitas antara Jepang-Cina sebagai faktor pendorong utama Jepang dalam menggencarkan diplomasi ekonominya di Asia-Pasifik adalah klaim yang masih bersifat prematur. Oleh karena itu, diplomasi ekonomi dan kebijakan ekspor infrastruktur Jepang dipengaruhi oleh faktor multidimensi.

Penelitian oleh Armstrong (2021) telah mengulas secara umum tentang diplomasi ekonomi Jepang dalam ekspor infrastruktur di kawasan Asia pada masa pemerintahan Shinzo Abe. Namun, penelitian tersebut belum mengulas secara khusus terkait diplomasi ekonomi Jepang dalam ekspor infrastruktur di Indonesia. Vietnam, Thailand, dan Indonesia adalah negara yang dikunjungi oleh Shinzo Abe dalam rangka kunjungan kenegaraan setelah terpilih sebagai Perdana Menteri di tahun 2013 (*Ministry of Foreign Affairs*, 2013). Indonesia memegang posisi strategis secara geografis di kawasan, memiliki skala pembangunan yang masif dan merupakan salah satu aktor kunci dalam politik di Asia Tenggara (Sulaiman, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana diplomasi ekonomi Jepang di bawah pemerintahan Shinzo Abe untuk merealisasikan ekspor infrastrukturnya di Indonesia.

Praktik diplomasi ekonomi bukanlah sebuah fenomena baru dalam hubungan antar bangsa. Akan tetapi, perhatian tentang diplomasi ekonomi dalam disiplin Ilmu Hubungan Internasional (HI) relatif baru (Okano-Heijmans, 2011). Perspektif arus utama ilmu Hubungan Internasional khususnya Realisme klasik dan Neo-realisme lebih berfokus pada isu politik-keamanan dan mengesampingkan isu ekonomi dalam memahami fenomena hubungan antarbangsa. Selain itu, perspektif ini cenderung mengedepankan negara sebagai fokus utama perhatiannya. Akibatnya, studi diplomasi erat dengan dimensi politik dan keamanan dan mengesampingkan dimensi ekonomi serta hanya berfokus pada aktor negara saja (Lee & Hocking, 2018)

Kontras dengan perspektif Realisme dan Neorealisme, perspektif Neoliberalisme memberikan kesempatan untuk melihat isu ekonomi, seperti interdependensi ekonomi dan regionalisme dalam studi diplomasi. Selain itu, perspektif Neoliberalisme mengakui aktor non-negara dalam hubungan internasional. Oleh karena itu, perspektif

Neoliberalisme memberikan kesempatan untuk melihat lebih seksama tentang diplomasi ekonomi. Perkembangan Diplomasi Ekonomi juga tidak terpisahkan dari kajian Ekonomi Politik Internasional (EPI). EPI sendiri merupakan subdisiplin dalam studi Ilmu Hubungan Internasional yang menganalisis kaitan antara ekonomi dan hubungan internasional (Bakry, 2019). EPI hadir mengawali perkembangan literatur dalam diplomasi ekonomi dalam disiplin ilmu Hubungan Internasional.

Secara tradisional, Sabaruddin (2017) mendefinisikan diplomasi ekonomi sebagai diplomasi yang berkaitan dengan kebijakan ekonomi di mana didalamnya memanfaatkan tindakan ekonomi seperti penghargaan hingga sanksi untuk mencapai kepentingan nasional, atau disebut juga sebagai *economic statecraft*. Dilihat dari proses dan tujuannya, diplomasi ekonomi adalah proses pengambilan keputusan dan advokasi suatu negara untuk memenuhi kepentingan bisnisnya dalam sistem internasional yang anarki (Arystankulova, 2018; Lee & Hocking, 2018). Artikel ini menggunakan Diplomasi Ekonomi yang dikembangkan oleh Okano-Heijmans sebagai landasan teori dan penelitian kualitatif sebagai metode penelitiannya.

Berlandaskan pada latar belakang di atas, peneliti bertujuan untuk menganalisis bagaimana diplomasi Jepang di masa pemerintahan Shinzo Abe dalam ekspor infrastruktur di Indonesia. Artikel ini berargumen bahwa Shinzo Abe telah menjalankan serangkaian strategi diplomasi ekonomi yang komprehensif untuk merealisasikan peningkatan ekspor sistem infrastruktur Jepang di Indonesia. Strategi diplomasi ekonomi yang komprehensif dan agresif dilakukan oleh Jepang untuk dapat bersaing dengan Cina di pasar kawasan Asia Tenggara. Adapun implikasi dari hasil penelitian ini adalah untuk memahami praktik diplomasi ekonomi Jepang di era kontemporer pasca Perang Dingin. Selain itu, penelitian ini memberikan pemahaman tentang praktik diplomasi ekonomi Jepang di Indonesia dan hubungan ekonomi-politik antara Jepang dan Indonesia.

Metodologi

Diplomasi Ekonomi oleh Okano Heijman

Diplomasi ekonomi memiliki dua ciri khas yang membedakannya dengan diplomasi-diplomasi lainnya. Pertama adalah keterlibatan peran kementerian lain selain Kementerian Luar Negeri, yaitu kementerian-kementerian yang mengurus isu-isu seperti ekonomi, pertanian, infrastruktur, dan energi. Kedua adalah hubungan erat dengan sektor

swasta. Aktor swasta lebih menargetkan tujuan ekonomi, sedangkan aktor pemerintahan sebagai pelaku utama diplomasi ekonomi cenderung pada tujuan politik seperti penguatan institusi (misalnya untuk menanggulangi isu lingkungan) dan stabilitas nasional maupun internasional. Kedua ciri khas diplomasi ekonomi ini menjadikan proses diplomasi ekonomi menjadi lebih kompleks. Kompleksitas ini muncul karena banyaknya aktor non-negara yang beragam dan aktor negara di berbagai tingkatan dalam mewujudkan diplomasi ekonomi (Okano-Heijmans, 2016: 555).

Okano-Heijmans (2013: 29-30) melihat diplomasi ekonomi sebagai bentuk pemanfaatan instrumen politik seperti negosiasi internasional dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan ekonomi dan stabilitas politik nasional. Diplomasi ekonomi dapat disimpulkan sebagai diplomasi yang dilakukan oleh negara didukung aktor non-negara seperti perusahaan swasta yang memiliki tujuan ekonomi dan politik melalui instrumen politik dan ekonomi.

Okano-Heijmans memetakan bahwa diplomasi ekonomi memiliki tiga pilar utama. Pertama adalah diplomasi komersial yang dapat diartikan sebagai diplomasi yang memanfaatkan alat politik untuk mencapai tujuan komersial dalam rangka memenuhi kepentingan ekonomi (Okano-Heijmans, 2013: 30). Aktor utama dari diplomasi komersial adalah pemerintah yang dibantu oleh kelompok atau institusi yang berkaitan dengan bisnis. Diplomasi komersial ini dilakukan oleh kementerian atau biro khusus perdagangan dan investasi di dalam negeri dan/atau kedutaan besar atau perwakilan lainnya di luar negeri. Pemerintah melakukan kerja sama dengan sektor publik dan swasta di negara penerima (Okano-Heijmans, 2016: 556).

Diplomasi komersial memiliki tiga aktivitas utama, yaitu promosi perdagangan ekspor, promosi investasi, dan advokasi bisnis. Promosi bisnis dilakukan oleh diplomat komersial bersama organisasi pemerintah dan swasta lainnya yang disebut juga sebagai organisasi pendukung bisnis. Pemerintah menyusun inisiatif promosi perdagangan yang bertujuan untuk meningkatkan aktivitas ekspor yang menguntungkan perusahaan maupun pemerintah nasional (Naray & Bezençon, 2017: 338). Menurut Jones-Bos et al. dalam (Okano-Heijmans, 2016), pemerintah menyediakan intelegensi pasar dan teknologi dan bantuan langsung seperti pertanyaan mengenai perdagangan, akses pasar, dan misi perdagangan.

Advokasi bisnis dilakukan oleh diplomat komersial bersama perusahaan-perusahaan bisnis di negara penerima (*commercial diplomat to business*). Diplomat komersial melakukan interaksi dengan perusahaan sebagai “klien” atau “*beneficiaries*” di mana diplomat komersial telah melakukan riset terlebih dahulu mengenai perusahaan bisnis yang ingin diajak kerja sama. Setelah itu, diplomat komersial mulai melakukan advokasi dan lobi dengan perusahaan tersebut (Naray & Bezençon, 2017: 337).

Kedua adalah diplomasi perdagangan. Diplomasi perdagangan memiliki dua aktivitas utama, yaitu melakukan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral, serta mengurus lisensi ekspor atau impor. Diplomasi perdagangan ini mulai populer sejak tahun 1990-an. Tidak efektifnya kerja sama multilateral seperti *World Trade Organization (WTO)* membuat negara-negara di dunia beralih kepada kerja sama bilateral dan regional. Hal ini juga didorong karena ada kepentingan ingin membicarakan isu politik seperti norma, pengaruh di kawasan, penguatan kerja sama, dan alokasi sumber daya (Okano-Heijmans, 2016: 557). Tujuan diplomasi perdagangan dapat bersifat politik, di mana diplomasi perdagangan dijadikan sebagai sarana untuk kompetisi penyebaran pengaruh di kawasan. Selain itu, tujuan diplomasi perdagangan juga dapat bersifat komersial serta untuk meningkatkan *cost-effective* (Okano-Heijmans, 2013: 31). Dalam diplomasi perdagangan juga, negara-negara melakukan manajemen kebijakan seperti sertifikasi lisensi ekspor-impor yang dapat mempermudah arus barang antarnegara tanpa harus melalui proses *due diligence* yang panjang (Putri, 2020).

Ketiga adalah bantuan ekonomi/pembangunan. Bantuan ekonomi dapat diartikan sebagai aktivitas yang secara jelas ditujukan untuk mendukung pengembangan nasional maupun internasional dan tidak dilakukan atas dasar mencari keuntungan. Negara pemberi secara sengaja melakukan pembedaan terhadap negara berkembang untuk meningkatkan kepemilikan negara berkembang tersebut (Alonso & Glennie, 2015: 4). Tujuan bantuan ekonomi atau pembangunan ini secara garis besar ada dua, yaitu tujuan ekonomi dan tujuan politik. Secara ekonomi, bantuan ekonomi dan pembangunan bertujuan untuk memacu kekuatan ekonomi kepada negara penerima dan negara penyedia *Official Development Assistance (ODA)* melalui perdagangan dan investasi. Tujuan ekonomi ini paling banyak dilakukan oleh negara non-Barat, seperti Jepang. Secara politik, bantuan ekonomi dan pembangunan bertujuan untuk mempromosikan nilai-nilai

seperti pemerintahan yang baik (*good governance*), demokrasi, atau hak asasi manusia (Okano-Heijmans, 2016: 556-7).

Bantuan ekonomi dan pembangunan memiliki tiga aktivitas utama, yaitu memberikan bantuan bilateral dalam bentuk hibah, pinjaman, dan pemutihan utang; bantuan multilateral; serta akses teknologi. Bantuan hibah dapat berupa bantuan dana umum, proyek investasi, bantuan kepada NGO, kontribusi terhadap institusi multilateral, dan dana multi-donor (*basket funds*). Bantuan pinjaman dapat berupa pinjaman luar negeri (*concessional loans*), multi-donor *trust fund*, pinjaman perdagangan (*aid for trade*), pinjaman yang konsesinya lebih rendah daripada ODA, kredit sindikasi, investasi ekuitas, pembiayaan *mezzanine*, dan instrumen mitigasi risiko. Akses teknologi juga merupakan bagian dari aktivitas bantuan ekonomi/pembangunan (Alonso & Glennie, 2015).

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus untuk mengoperasionalkan pendekatan teoritis yang telah dijelaskan sebelumnya. Yin (2018) mendefinisikan studi kasus sebagai sebuah penelitian yang mendalam terhadap suatu kejadian, peristiwa, atau kegiatan tertentu dalam suatu periode waktu dengan melakukan pengumpulan informasi secara komprehensif terhadap periode waktu yang telah ditentukan. Metode penelitian kualitatif studi kasus bertujuan untuk mendalami kompleksitas suatu kasus tertentu, dalam hal ini adalah diplomasi ekonomi Jepang pada masa kepemimpinan Shinzo Abe di Indonesia. Penelitian ini mengumpulkan data dokumen dari ragam sumber yang bersifat publik diantaranya laporan lembaga pemerintah Jepang dan Indonesia, *press release* lembaga pemerintah Jepang dan Indonesia, laporan lembaga non-pemerintah, berita koran *online* dan berita majalah *online* dari media massa Indonesia dan Jepang yang dipublikasikan antara tahun 2012 sampai dengan 2020. Data-data yang dikumpulkan berfungsi untuk membangun lalu menganalisis kasus dari segi pandang logika sosial (Raco, 2010: 50). Proses analisis data kualitatif pada studi ini yaitu penulis mengumpulkan data, memetakan data-data yang dikumpulkan, membuat interpretasi atau memaknai data, menganalisis data dan menuliskan penemuan (Creswell & Poth, 2017). Data dianalisis menggunakan landasan teori diplomasi ekonomi yang telah dijelaskan sebelumnya.

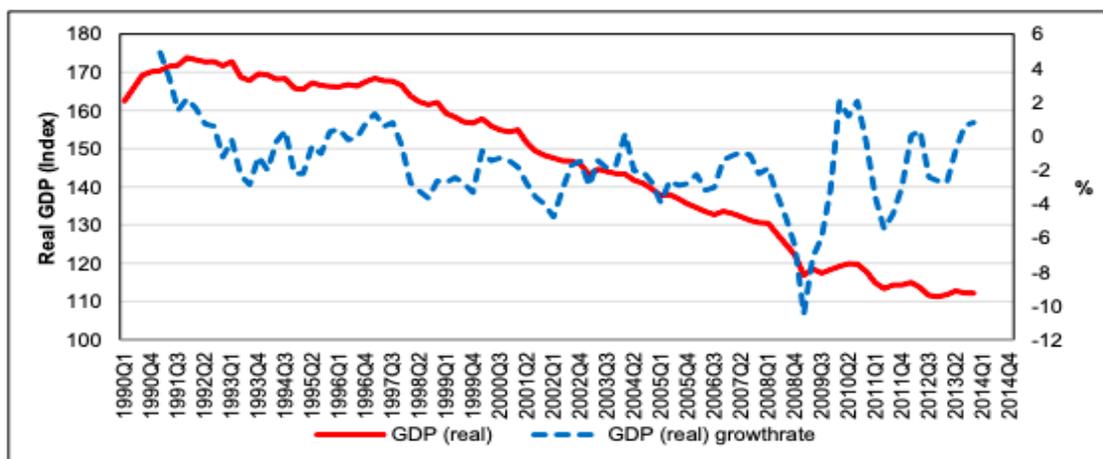
Pembahasan

Strategi Abenomics dan Ekspor Infrastruktur Jepang: Dorongan Internal dan Eksternal

Kebijakan ekspor infrastruktur Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe tidak hanya didorong oleh strategi politik Jepang untuk mengimbangi pengaruh Cina. Kebijakan ini juga didorong oleh situasi ekonomi domestik Jepang dan kesempatan komersial yang ditawarkan oleh kawasan Asia-Pasifik, termasuk Indonesia.

Sejak gelembung ekonomi Jepang pecah dan diikuti dengan krisis finansial Asia mengakibatkan Jepang mengalami deflasi dan stagnasi dalam perekonomiannya. Kondisi tersebut telah berlangsung selama tiga dekade, dimulai sejak tahun 1990-an. Situasi ini juga diperkeruh dengan krisis ekonomi dunia pada 2008-2009. Pada tahun 1988, *Gross Domestic Product (GDP)* Jepang tumbuh sebesar 6.8% dan pada tahun 2013 hanya sebesar 2% (*The International Monetary Fund (IMF)*, 2020). Tidak hanya itu, pada tahun 2017, rasio utang pemerintah Jepang terhadap GDP mencapai 220%. Nilai ini tercatat tertinggi diantara negara-negara *OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development)* (OECD, 2017:182). Situasi ini memperlihatkan penurunan kedudukan ekonomi Jepang di dunia internasional yang disebabkan oleh pelambatan pertumbuhan ekonomi yang telah lama terjadi di Jepang (Yoshino & Taghizadeh-Hesary, 2015).

Gambar 1- Tren *Gross Domestic Product (GDP)* Jepang, 1990-2014



Sumber: Yoshino & Taghizadeh-Hesary, 2015:3

Penurunan GDP (*real*) Jepang juga dipengaruhi oleh masalah sosial. Penyusutan produktivitas tenaga kerja dan pelemahan konsumsi domestik sangat dipengaruhi oleh jumlah penduduk Jepang. OECD (2019:17) melaporkan bahwa populasi Jepang yang berumur di atas 65 tahun meningkat 50% di tahun 2017, sementara itu angka kelahiran pada tahun 2016 tidak lebih dari satu juta jiwa. Laporan dari IMF (2020) memperlihatkan bahwa rata-rata angka kelahiran bayi di Jepang hanya 1.4 anak per perempuan di tahun 2018. Hal ini masih di bawah angka harapan yaitu 2.1 anak per perempuan. Angka kelahiran yang tinggi dapat membantu dalam perbaikan GDP Jepang.

Pelambatan pertumbuhan ekonomi tidak hanya menjadi masalah serius dalam bidang ekonomi, namun juga berimplikasi bagi politik-keamanan Jepang di kawasan. Hal ini dikarenakan saat pertumbuhan ekonomi Jepang melemah, negara-negara tetangga, terutama Cina mengalami pertumbuhan ekonomi pesat. Puncaknya adalah pada akhir tahun 2010, untuk pertama kalinya Cina menduduki posisi ke-2 sebagai negara ekonomi terbesar di dunia dan menggeser kedudukan Jepang (BBC, 2011). GDP Jepang yang rendah menyebabkan belanja militer yang berkurang, sementara itu belanja militer Cina semakin meningkat. Di tahun 2013, total belanja militer Cina sebesar 1.7% dari total GDP-nya atau setara dengan \$USD 164,07 miliar sementara itu Jepang menghabiskan 1% dari total GDP atau setara dengan \$USD 49,03 miliar (*The World Bank*, 2019). Peningkatan kekuatan ekonomi dan militer Cina mendorong peningkatan pengaruh Cina dalam dunia internasional, khususnya di kawasan Asia-Pasifik.

Yoshimatsu (2021: 3) menyatakan bahwa Shinzo Abe adalah seorang perdana menteri yang tidak biasa di Jepang. Pertama, Shinzo Abe adalah perdana menteri pertama di Jepang yang berhasil duduk kembali di posisi perdana menteri setelah sempat tersingkirkan. Pada tahun 2012, Shinzo Abe kembali duduk sebagai perdana menteri Jepang, setelah sebelumnya menjabat di posisi yang sama pada 2006 hingga 2007. Di tahun 2012, *Liberal Democratic Party* (LDP) memenangkan pemilu dan menjadikan Shinzo Abe sekali lagi sebagai Perdana Menteri Jepang. Kedua, Shinzo Abe dipandang sebagai seorang politisi yang konservatif dimana dia memiliki keinginan untuk mempertahankan posisi utama Jepang di dunia internasional (Yoshimatsu, 2021).

Di awal kepemimpinannya, PM Shinzo Abe memperkenalkan sebuah paket kebijakan baru yang dikenal sebagai "*Abenomics*". Tujuan utama *Abenomics* adalah untuk menggiatkan kembali ekonomi Jepang yang telah lama mengalami perlambatan

pertumbuhan (Solís & Urata, 2018: 106). Sejumlah pihak menilai bahwa kebijakan *Abenomics* ini memberikan optimisme bagi masyarakat Jepang terhadap masa depan ekonominya (Sato, 2020: 54).

Pada Juni 2013, dokumen yang dinamakan *Japan Revitalization Strategy* (JRS) dikeluarkan oleh pemerintah Jepang (kemudian direvisi pada Juni 2014). Dokumen ini menjelaskan pilar ketiga dari *Abenomics*. Dalam hubungannya dengan strategi pertumbuhan sebagai pilar ketiga dalam *Abenomics*, JRS memiliki empat komponen, yaitu (1) promosi investasi; (2) peningkatan penggunaan SDM; (2) pembentukan pasar baru; (4) integrasi ekonomi global (Wakatabe, 2015:130). Berdasarkan *Japan Revitalization Strategy 2014*, dalam strategi pertumbuhan Jepang untuk menjangkau pasar global, Jepang menargetkan untuk meningkatkan pendapatan proyek infrastruktur luar negeri Jepang pada tahun 2020 sebesar 30 triliun yen. Pada tahun 2013, nilai proyek infrastruktur luar negeri Jepang sebesar 9.3 triliun yen (*Prime Minister of Japan and His Cabinet*, 2014:166).

Pasar infrastruktur Asia Tenggara adalah salah satu yang sedang berkembang dan menjadi sasaran bagi Jepang. Menurut laporan dari PwC Singapore (2017), kawasan Asia Tenggara mengalami peningkatan belanja dalam bidang infrastruktur sejalan dengan peningkatan GDP-nya. Akan tetapi, meskipun terjadi peningkatan infrastruktur di Asia Tenggara, namun masih belum memadai dan merata. Bagi sejumlah negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, infrastruktur memiliki peran penentu untuk menjaga keberlangsungan pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur juga diperlukan guna meningkatkan konektivitas baik di dalam maupun antarnegara di kawasan Asia Tenggara. Infrastruktur juga dibutuhkan dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Dalam laporannya, *Asian Development Bank* (ADB) mengestimasi antara tahun 2016-2030, negara-negara di Asia-Pasifik memiliki kebutuhan investasi infrastruktur sebesar \$1.7 triliun per tahunnya (*Asian Development Bank* (ADB), 2017). Pada tahun 2015, kawasan Asia-Pasifik menghabiskan dana US\$ 2,144 milyar untuk kebutuhan investasi infrastrukturnya (PwC Indonesia, 2016). Sementara itu, Indonesia pada tahun 2015 membelanjakan US\$15,5 milyar atau setara dengan Rp. 209 triliun untuk kebutuhan infrastrukturnya (PwC Indonesia, 2016). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 Indonesia menunjukkan bahwa sektor infrastruktur menjadi perhatian pemerintah Indonesia dan infrastruktur tersebut diantaranya adalah

energi dan ketenagalistrikan, air dan sanitasi, jalan, transportasi umum, kereta api, pelabuhan, dan bandara. Untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur tersebut, pemerintah Indonesia tidak dapat sepenuhnya berjalan sendiri. Pemerintah Indonesia membutuhkan kerja sama dengan pihak lain untuk penyediaan investasi dan pengadaan infrastruktur. Kebutuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia menjadi peluang ekonomi dan politik bagi Jepang. Dengan demikian, ekspor infrastruktur Jepang ke negara-negara Asia, seperti Indonesia, merupakan salah satu respons untuk memperbaiki perekonomian Jepang.

Pemanfaatan Tiga Pilar Diplomasi Ekonomi Jepang di Indonesia Era Pemerintahan Shinzo Abe (2012-2020)

Praktik diplomasi ekonomi telah menjadi salah satu karakteristik dari kebijakan luar negeri Jepang. Diplomasi dilakukan berdasarkan kepentingan nasional dengan melibatkan sejumlah aktor. Dalam Cetak Biru Diplomasi Jepang (MOFA Japan, 2013a) disebutkan bahwa salah satu dari tiga pilar prioritas kebijakan luar negeri Jepang adalah “memperkuat diplomasi ekonomi Jepang sebagai upaya untuk revitalisasi ekonomi nasional.” Terdapat tiga pilar dalam diplomasi ekonomi Jepang, yaitu diplomasi komersial, diplomasi perdagangan, dan development cooperation. Diplomasi ekonomi melibatkan beberapa aktor pemerintah, diantaranya adalah Kementerian Luar Negeri, *Japan External Trade Organization (JETRO)*, dan *Japan International Cooperation Agency (JICA)*. Tidak hanya ketiga institusi ini saja, perdana menteri juga merupakan pihak yang berperan dalam diplomasi ekonomi. Perdana Menteri Jepang memiliki kekuasaan dalam membentuk agenda diplomasi Jepang (Envall, 2015). Shinzo Abe sebagai Perdana Menteri dengan masa kepemimpinan terlama dalam perpolitikan Jepang memiliki pengaruh dalam membentuk dan menjalankan agenda diplomasi ekonomi Jepang. Pada bagian ini penulis akan menguraikan tiga pilar diplomasi ekonomi Jepang pada masa pemerintahan Shinzo Abe (2012-2020) untuk tujuan ekspor infrastruktur di Indonesia.

Shinzo Abe selaku Perdana Menteri menjadi aktor penting dalam diplomasi komersial Jepang. Selama 2013-2020, PM Shinzo Abe telah melakukan kunjungan luar negeri sebanyak 81 kali, yang mana jumlahnya melampaui Perdana Menteri Jepang lainnya yang telah menjabat. PM Shinzo Abe menempatkan dirinya sebagai *‘top-level*

sales' dalam upaya promosi perdagangan infrastruktur dan promosi investasi infrastruktur Jepang di berbagai negara, termasuk Indonesia (New York Times, 2013). Promosi dilakukan oleh PM Shinzo Abe secara bilateral maupun multilateral dalam berbagai agenda *high-level meeting*. Selama tahun 2012 hingga 2020, Shinzo Abe telah mengunjungi Indonesia sebanyak empat kali (*Ministry of Foreign Affairs of Japan*, 2023a). Di samping kunjungan kenegaraan, PM Shinzo Abe juga melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan Presiden Indonesia di sela-sela pertemuan multilateral yang melibatkan kedua negara, salah satunya contohnya adalah pertemuan bilateral antara PM Shinzo Abe dan Presiden Joko Widodo ditengah rangkaian pertemuan KTT G-7 di Ise-Shima, Jepang (*Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia*, 2016).

Setelah duduk di kursi Perdana Menteri Jepang pada tahun 2012, kunjungan kenegaraan pertama yang dilakukan oleh Shinzo Abe pada 16-18 Januari 2013 adalah Vietnam, Thailand, dan Indonesia. Pada kunjungannya di Indonesia, isu ekonomi tidak luput dalam pembahasan antara PM Shinzo Abe dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Perdana Menteri Shinzo Abe mengemukakan kepada Presiden SBY bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia sangat penting bagi rehabilitasi ekonomi Jepang. PM Shinzo Abe juga membahas promosi kerja sama infrastruktur antara Indonesia dan Jepang, khususnya dalam pembangunan "*Jakarta Metropolitan Area*" (*Ministry of Foreign Affairs of Japan*, 2013).

Pada Oktober 2013, PM Shinzo Abe hadir dan memberikan pidato dalam *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) CEO Summit* di Bali. Dalam pidatonya, PM Shinzo Abe Mengemukakan terkait prospek kerja sama antara Jepang dengan negara-negara anggota APEC dalam hal pengembangan infrastruktur di kawasan dengan berbagi pengalaman dan praktik baik yang dimiliki oleh Jepang (*Official Website of the Prime Minister of Japan and His Cabinet*, 2013c). Di sela-sela pertemuan KTT APEC di Bali, PM Shinzo Abe juga kembali bertemu dengan Presiden SBY secara bilateral untuk mendiskusikan terkait kerja sama perdagangan, investasi dan peningkatan infrastruktur di Indonesia (MOFA, 2013b). Tidak hanya bertemu dengan presiden Indonesia, PM Shinzo Abe juga menemui pengusaha-pengusaha Indonesia yang diwakili oleh Kadin & Apindo dalam rangka meningkatkan kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Jepang (Detikfinance, 2013).

Pertemuan lanjutan antara Jepang dan Indonesia adalah saat Jepang mengundang negara-negara Asia Tenggara dalam *ASEAN-Japan Commemorative Summit*, 13-14 Desember 2013 di Tokyo. Pada pertemuan bilateral antara Indonesia dan Jepang, kembali dibahas kerja sama terkait perdagangan, investasi, dan pembangunan infrastruktur. Pertemuan bilateral antara PM Shinzo Abe dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sepakat untuk mempromosikan kerja sama *Metropolitan Priority Area for Investment and Industry (MPA)* di wilayah Jabodetabek antara Indonesia dan Jepang. Kemudian, Jepang bersedia memberikan bantuan luar negeri kepada Indonesia untuk mendanai 7 proyek infrastruktur sejumlah 62 miliar yen (MOFA Japan, 2013c).

Sebagai *top level sales*, promosi perdagangan dan investasi infrastruktur juga digencarkan oleh PM Shinzo Abe kepada Indonesia pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Presiden Joko Widodo terkenal atas aspirasinya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya yang berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada Maret 2015, Presiden Joko Widodo mengunjungi Jepang untuk mendiskusikan sejumlah kerja sama di bidang infrastruktur, khususnya infrastruktur pada Pelabuhan, bandara, *powerplant*, kereta cepat dan jalan tol (Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, 2015). Pertemuan antara Presiden Joko Widodo dan Shinzo Abe bertemakan “*Towards Further Strengthening of the Strategic Partnership by Sea and Democracy.*” Kemudian, Shinzo Abe mengunjungi Indonesia dan kembali bertemu Presiden Joko Widodo dalam rangka menghadiri KTT Asia-Afrika di Jakarta pada April 2015. Pada pertemuan bilateral di sela KTT Asia-Afrika ini, PM Shinzo Abe kembali menyatakan keinginan Jepang untuk bekerja sama dalam pembangunan infrastruktur di bidang pelabuhan, kereta cepat dan *power plant* di Indonesia (MOFA Japan, 2015).

Pada November 2015 berlangsung pertemuan Japan-ASEAN Summit Meeting di Malaysia, PM Abe menyampaikan promosinya kepada negara-negara di Asia Tenggara perihal inisiatif baru Jepang yaitu, *Partnership for Quality Infrastructure* (ASEAN, 2015). Sebelumnya, inisiatif *Quality Infrastructure*, pertama kali dipromosikan oleh PM Abe pada Mei 2015 dalam Konferensi Internasional ‘*Future Asia*’ ke-21 yang diadakan di Tokyo (Masuo, 2020:18). Dalam inisiatif tersebut, Jepang berkomitmen untuk menyediakan infrastruktur yang berkualitas tinggi bagi negara-negara mitranya di Asia. Untuk mendanai proyek infrastruktur yang berkualitas tersebut, Jepang menyediakan beberapa pilihan pendanaan, termasuk dari ODA Jepang, *Japan Bank for International*

Cooperation (JBIC) serta *Asian Development Bank* (ADB) (*Ministry of Foreign Affairs of Japan*, 2015). Promosi terhadap ekspor *Quality Infrastructure* kemudian dilakukan oleh Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang dalam berbagai pertemuan bilateral dengan kementerian terkait di Asia (MLIT Japan, 2017).

Saat Jepang menjadi tuan rumah KTT G-7 pada tahun 2016, promosi *Quality Infrastructure* kembali digaungkan oleh pemerintah Jepang. Presiden Joko Widodo yang saat itu diundang oleh Jepang untuk menghadiri KTT G-7 kembali bertemu dengan PM Shinzo Abe dan melakukan pertemuan bilateral untuk mendiskusikan perihal pembangunan Pelabuhan Patimban di Jawa Barat, kerja sama pembangunan proyek listrik di Batang, dan rencana pembangunan jalur kereta api lintas utara Pulau Jawa (Gideon, 2016). Dalam KTT G-7 2016, PM Shinzo Abe memanfaatkan pertemuan tersebut untuk semakin mempromosikan inisiatifnya terkait *partnership for quality infrastructure* bukan hanya kepada negara-negara anggota G-7 saja namun juga negara-negara undangan yang hadir pada pertemuan G-7 tersebut, termasuk Indonesia (*Ministry of Foreign Affairs of Japan*, 2016).

Pada 2017, sejumlah *high-level meeting* dilakukan antara PM Shinzo Abe dengan Presiden Joko Widodo serta Wakil Presiden Jusuf Kalla. Pertama, pada Januari 2017, PM Shinzo Abe melaksanakan kunjungan kenegaraan di Indonesia. Kemudian, di bulan Juni 2017, Wakil Presiden Jusuf Kalla melaksanakan kunjungan ke Jepang. Terakhir, pada November 2017, PM Shinzo Abe dan Presiden Joko Widodo bertemu kembali di Manila jelang KTT ASEAN 2017. Agenda kerja sama yang senantiasa didiskusikan antara kedua pihak meliputi pembangunan infrastruktur dalam sektor maritim dan energi, pembangunan Pelabuhan Patimban melalui skema *Public-Private Partnership* (PPP), pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya dan proyek pembangunan drainase Jakarta (*Embassy of Japan in Indonesia*, 2017; MOFA Japan, 2017b, 2017c). Pada kunjungan kenegaraan Jepang ke Indonesia di tahun 2017, keikutsertaan delegasi bisnis Jepang meramaikan kunjungan tersebut. PM Shinzo Abe turut membawa 30 delegasi pengusaha Jepang. Sejumlah perusahaan yang ikut serta saat ini telah menjalankan sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia, seperti *Electric Power Development Co. Ltd.* (J-Power) pada proyek PLTU Batang (Bhimasena Power, 2016).

Aktivitas diplomasi kepala negara tidak hanya berpusat pada isu keamanan dan stabilitas saja, akan tetapi telah meluas termasuk pada promosi aktivitas komersial (Ostander & Rider, 2019). Diplomasi komersial dalam rangka mempromosikan pelaku usaha menjadi salah satu aktivitas yang dilakukan oleh PM Shinzo Abe. Dalam kunjungan internasionalnya, PM Shizo Abe mengikutsertakan para CEO perusahaan-perusahaan Jepang untuk mempromosikan ekspor infrastruktur Jepang, seperti saat kunjungan PM Shinzo Abe di Indonesia pada tahun 2017 (APKASI, 2017).

Selain PM Shinzo Abe yang melakukan promosi dagang dan investasi infrastruktur dengan pemerintah Indonesia, Kementerian Luar Negeri juga memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan diplomasi komersial. Salah satu tujuan Kementerian Luar Negeri Jepang dalam menjalankan aktivitas diplomasinya adalah untuk merevitalisasi ekonomi Jepang, sesuai dengan pilar ketiga prioritas kebijakan luar negeri Jepang. Dalam Buku Biru Diplomasi Jepang 2013, Kementerian Luar Negeri selaku pihak pemerintah berperan dalam mendukung perusahaan-perusahaan Jepang dalam menjalankan ekspor infrastruktur. Adapun dukungan yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri Jepang adalah menjalankan aktivitas *public relations* bagi perusahaan Jepang di luar negeri dan melaksanakan promosi produk barang, teknologi, dan jasa Jepang dengan menjadi *co-host* pada kegiatan pameran atau perjamuan di luar negeri. Kemudian, misi diplomatik mengawal dan memfasilitasi perusahaan-perusahaan Jepang yang akan melakukan ekspansi bisnis di luar negeri. Tidak hanya itu, pihak kementerian luar negeri juga mengumpulkan dan mengkonsolidasi informasi terkait negara tujuan pasar bagi produk perusahaan Jepang (MOFA Japan, 2017a). Secara khusus, Kementerian Luar Negeri Jepang memiliki Biro Hubungan Ekonomi. Kemudian, Kementerian Luar Negeri Jepang juga menerjunkan "*officer in charge of infrastructure projects*" yang berjumlah 200 orang dan ditempatkan pada 97 misi diplomatik di 75 negara (MOFA Japan, 2021).

Peranan Duta Besar Jepang di negara penerima juga strategis dalam melakukan promosi dan lobi terkait produk infrastruktur Jepang di negara penerima. Sebagai gambaran, setelah Presiden Joko Widodo menduduki jabatan sebagai Presiden Indonesia pada bulan Juli 2014, Menteri Luar Negeri Jepang, Fumio Kishida melakukan kunjungan ke Indonesia pada Agustus 2014. Kunjungan ini dimanfaatkan oleh Fumio Kishida untuk menyampaikan keinginan Jepang untuk memperkuat kerja sama ekonomi dan politik dengan Indonesia (MOFA, 2014). Setelah kunjungan tersebut, Duta Besar Jepang untuk

Indonesia, yaitu Tanizaki Yasuaki melakukan berbagai kunjungan kehormatan dengan pejabat pemerintahan di Indonesia, diantaranya Yusuf Kalla selaku Wakil Presiden RI, Sofyan Djalil selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro sebagai Menteri Keuangan RI, dan Basoeki Hadimoeljono sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, 2014a; 2015). Kesamaan agenda yang dibahas dalam setiap pertemuan Duta Besar Tanizaki Yasuaki adalah terkait kerja sama pembangunan infrastruktur oleh Jepang di Indonesia. Duta Besar Tanizaki Yasuaki juga pembahasan proyek-proyek strategis antara Jepang dan Indonesia seperti proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung-Surabaya, proyek pembangunan *Jakarta Mass Rapid Transit (MRT) North-South Line and East-West Line*, proyek pembangunan *Jawa-Sumatra Interconnection Transmission Line*, dan proyek pembangunan Pelabuhan Cilamaya (kemudian berganti menjadi Pelabuhan Patimban) (Kedutaan Besar Jepang di Indonesia, 2014b; 2014c; 2014d; 2014e).

Aktor lain dalam diplomasi komersial Jepang adalah JETRO atau *Japan External Trade Organization*. Agensi ini merupakan salah satu lembaga pemerintah Jepang yang terbentuk sejak tahun 1958. JETRO tidak berdiri dibawah kedutaan besar Jepang dan bekerja secara independen (Naray, 2008:8). JETRO bertindak sebagai salah satu pelaksana kebijakan perdagangan yang dirancang oleh METI (*Ministry of Economy, Trade and Industry*) (Sakurai, 2007:13). JETRO berperan dalam pelaksanaan promosi perdagangan dan investasi Jepang di luar negeri. JETRO memiliki 76 kantor perwakilan di 55 negara, termasuk salah satunya adalah Indonesia (JETRO, 2022a).

Sejumlah aktivitas yang dilakukan oleh JETRO diantaranya adalah menyelenggarakan pameran perdagangan untuk produk barang dan jasa Jepang di luar negeri dan memfasilitasi pertemuan bisnis serta *networking* antara perusahaan Jepang dengan pengusaha asing. Selain itu, JETRO juga melakukan *market intelligence* dan membagikan informasi tersebut kepada perusahaan Jepang melalui laporan dan seminar yang diselenggarakannya. Kemudian, JETRO secara aktif mengumpulkan usulan dan pendapat dari perusahaan Jepang yang beroperasi di Indonesia untuk kemudian mengadvokasi kebijakan kepada pemerintah Indonesia dan berbagai kementerian dan lembaga di Indonesia (JETRO, 2022b). JETRO memiliki sejumlah program diantaranya adalah menyelenggarakan seminar dan simposium dengan mengundang pemerintah dan

kelompok bisnis, mengundang pihak yang memiliki peran penting dalam bisnis di negara tersebut (termasuk para pejabat kementerian terkait) untuk memperkenalkan teknologi infrastruktur Jepang. Selain itu, JETRO juga menjalankan program *dispatch engineers* dari perusahaan Jepang untuk mempromosikan teknologi infrastruktur Jepang (METI Japan, 2021).

Dokumen “*Comprehensive Growth Strategy*” Jepang tahun 2014 menyebutkan bahwa diplomasi perdagangan adalah bagian dari strategi Jepang untuk merevitalisasi perekonomiannya. Diplomasi perdagangan dapat membantu Jepang dalam menghapus berbagai bentuk hambatan ekspor produk-produk Jepang ke pasar Indonesia. Sejumlah negosiasi kerja sama perdagangan dilakukan, termasuk *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* yang melibatkan Indonesia dan Jepang. Penelitian ini khusus melihat diplomasi perdagangan Jepang dalam *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* atau Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional.

RCEP lahir sebagai pakta perdagangan setelah Indonesia di masa kepemimpinannya sebagai ketua ASEAN tahun 2011 meyakinkan negara anggota ASEAN lainnya untuk menjadikan inisiatif RCEP sebagai inisiatif ASEAN. Kemudian, ASEAN menawarkan inisiatif RCEP ini kepada seluruh Mitra Wicara FTA ASEAN (Gultom, 2020). Pakta perdagangan RCEP terdiri dari 15 negara, diantaranya adalah 10 negara anggota ASEAN (Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam), serta lima mitra wicara FTA ASEAN (Jepang, Cina, Korea Selatan, Australia, dan Selandia Baru). Sebelum ditandatangani oleh Menteri Ekonomi/Perdagangan dari masing-masing negara anggota RCEP pada November 2020, sejumlah perundingan telah dilaksanakan dari tahun 2013 hingga November 2019. Dalam putaran negosiasi, Jepang diwakili oleh *Deputy Director-General Economic Affairs Bureau* dari Kementerian Luar Negeri Jepang dan perwakilan kementerian terkait. Sementara itu, dalam pertemuan tingkat menteri RCEP, Jepang diwakili oleh Menteri Ekonomi, Perdagangan dan Industri (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2020; MOFA Japan, 2020).

RCEP sejalan dengan kepentingan Jepang untuk meningkatkan ekspor dan investasi infrastrukturnya di Asia-Pasifik. Jepang memiliki prioritas untuk menegakkan perdagangan yang bebas dengan cara memainkan peran aktif dalam pembentukan pakta perdagangan yang komprehensif (*Official Website of the Prime Minister of Japan and*

His Cabinet, 2019). Kelompok bisnis Jepang melihat bahwa RCEP dapat memberikan kesempatan bagi perusahaan-perusahaan Jepang untuk meningkatkan akses pasarnya dan memperluas investasinya di kawasan Asia-Pasifik (Keidanren, 2020). Dalam “*Proposals for Redefining Trade Strategy 2013*”, Keidanren memberikan saran agar pemerintah Jepang memfasilitasi kelompok bisnis Jepang dalam perdagangan internasional dengan memainkan peran dalam memperbaharui aturan perdagangan, termasuk berpartisipasi dalam RCEP. Saran yang diajukan oleh Keidanren dalam diplomasi perdagangan Jepang dalam RCEP meliputi pengurangan atau penghapusan tarif perdagangan, liberalisasi perdagangan jasa dan investasi, perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, dan perbaikan iklim bisnis serta transparansi aturan nasional negara mitra (Keidanren, 2013).

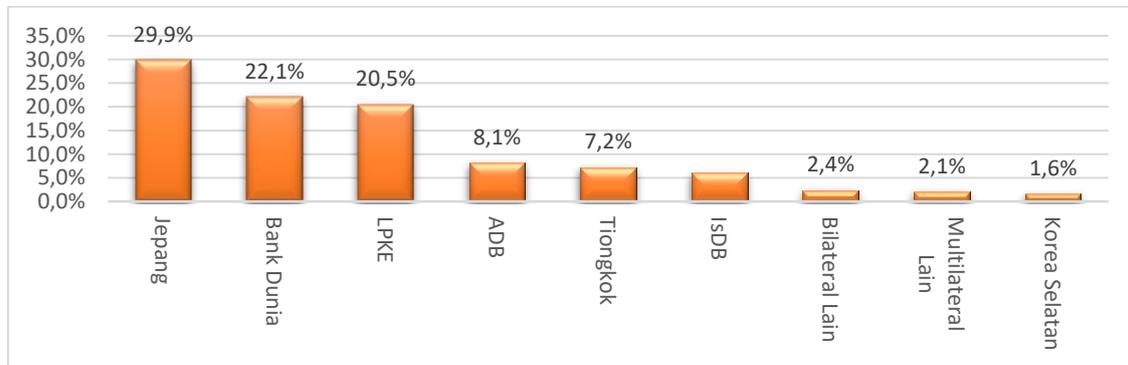
Bantuan ekonomi telah digunakan oleh Jepang sebagai salah satu instrumen kebijakan luar negerinya untuk mencapai kepentingan nasional (Jain, 2016). Sejak lama Jepang menggunakan Bantuan Pembangunan Pemerintah sebagai salah satu instrumen diplomasi luar negerinya. Pada tahun 2015, Perdana Menteri Shinzo Abe mengumumkan pendanaan \$110 miliar (13 triliun yen) dalam bentuk bantuan untuk pembangunan infrastruktur ‘*high-quality*’ di Asia. Di bawah inisiatif ini, pendanaan akan disalurkan melalui tiga saluran, yaitu ADB, JICA, dan JBIC (Kameda, 2015).

JICA merupakan agensi pemerintah Jepang yang berperan dalam menyalurkan bantuan pembangunan Jepang kepada negara-negara berkembang. Dalam melaksanakan tugasnya, JICA berlandaskan pada Development Cooperation Charter. Sementara itu, JBIC atau Japan Bank for International Cooperation merupakan bank di bawah naungan Kementerian Keuangan. Dua dari empat misi JBIC adalah mempromosikan pembangunan luar negeri dan mengamankan sumber daya yang penting bagi Jepang dan menjaga dan meningkatkan daya saing industri Jepang. Dibandingkan JICA, JBIC berfokus pada pendanaan dan kerja sama keuangan bersama institusi. JBIC memiliki 10 jenis bantuan, yaitu bantuan pinjaman ekspor, bantuan pinjaman impor, investasi asing, pinjaman *untied*, investasi ekuitas, jaminan, *bridge loan*, akuisisi aset pinjaman serta hubungan publik-korporasi, studi penelitian, dan sekuritisasi beserta instrumen keuangan lainnya (*Japan Bank for International Cooperation*, n.d.).

Indonesia menjadi salah satu negara penerima bantuan dari Jepang dalam bentuk pinjaman luar negeri. Berdasarkan laporan dari Kementerian PPN/Bappenas di tahun 2020, Jepang menduduki posisi pertama sebagai negara pemberi pinjaman luar negeri

Indonesia melalui mekanisme bantuan bilateral JICA dan ADB. Berikut gambar proporsi pinjaman luar negeri Indonesia berdasarkan sumber pinjamannya di tahun 2020.

Diagram 1 – Persentase Sumber Pinjaman Luar Negeri Indonesia Tahun 2020



Sumber: (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020:6)

Bantuan pendanaan pembangunan menjadi salah satu pilar diplomasi ekonomi Jepang di Indonesia. Sejak tahun 2013 hingga 2020, terdapat 22 proyek bantuan luar negeri Jepang untuk Indonesia yang didanai melalui mekanisme JICA (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2020). Pinjaman luar negeri Jepang oleh JICA didominasi untuk proyek infrastruktur.

Tiga diantara 22 proyek pendanaan pinjaman luar negeri Indonesia dari Jepang melalui mekanisme JICA selama periode 2013-2020 merupakan skema *Japan Tied*. Pertama, pada tahun 2016 Pemerintah Indonesia dan JICA menyepakati proyek “*Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project Phase I (Stage II)*” dengan nilai pinjaman USD 727,8 Juta. Kedua, pada tahun 2018, JICA memberikan pendanaan pinjaman luar negeri untuk proyek “*Patimban Port Development Project (I)*” dengan nilai pinjaman USD 1.150,5 Juta. Terakhir, pada tahun 2019, pada proyek “*Construction of Jakarta Mass Rapid Transit Project Phase II (I)*” JICA memberikan pinjaman sebesar USD 677,5 (JICA, n.d.; Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2020).

Pinjaman yang bersifat “*tied*” diartikan bahwa pinjaman tersebut disertai dengan persyaratan tertentu. Kedua proyek tersebut dilaksanakan dalam kerangka kerja sama *Special Terms for Economic Partnership (STEP)*. STEP pertama kali hadir pada Juli 2002 dan menekankan peran utama Jepang, baik dari segi bantuan teknologi, pembiayaan dan

pengetahuan oleh perusahaan Jepang (*Japan International Cooperation Agency*, n.d.). Proyek infrastruktur ekonomi yang diberikan pinjaman dengan skema ini selalu dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan Jepang, sehingga jenis bantuan ini dipandang bermanfaat bagi perekonomian Jepang (Hoshiro, 2022). Kemudian, kendati proyek infrastruktur lainnya dilaksanakan dengan skema *General Untied*, namun keterlibatan perusahaan Jepang juga ada dalam pelaksanaan proyek tersebut. Sebagai contoh, kontraktor dari proyek *Lumut Balai Geothermal Power Plant Project* adalah PT. Wijaya Karya bersama Marubeni Corporation (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2017). Selain itu, pembangunan *Jakarta Sewarage Development Project* akan dilakukan oleh *joint venture* antara Kumagai Gumi, Co, Ltd – PT. Wijaya Karya – PT Kaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk (*Japan International Cooperation Agency*, 2023).

Dengan skema *Japan-tied*, pembangunan konstruksi MRT fase 1 dan 2 dikerjakan oleh konsorsium (*joint operation*) antara perusahaan Jepang dan Indonesia. Diantaranya adalah Tokyu-Wijaya Karya *Joint Operation* (TWJO), Obayashi-Shimizu-Jaya Konstruksi (OSJ), Shimizu-Obayashi-Wijaya Karya-Jaya Konstruksi *Joint Venture* (SOWJ JV), Sumitomo-Mitsui-Hutama Karya *Joint Operation* (SMCC-HK JO), *Metro One Consortium (MOC) Mitsui & Co–Tokyo Engineering Corporation–Kobe Steel, Ltd.–Inti Karya Persada Teknik*, dan Sumitomo Corporation (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021).

Pembangunan Pelabuhan Patimban tahap I menyerap total dana sebesar Rp. 17,2 triliun. Pemerintah Jepang dan Indonesia sepakat melaksanakan kerja sama pembangunan Pelabuhan tersebut dengan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) yang mana terdiri dari APBN dengan pinjaman luar negeri, APBD, dan swasta (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2019). Pada November 2017, JICA menandatangani pemberian bantuan pembangunan kepada pemerintah Indonesia senilai 118.9 juta yen (Rp. 14,2 triliun). Pendanaan dari pinjaman Jepang setara dengan 83% total dana yang dibutuhkan (The Jakarta Post, 2017).

Pada segi komersial, proyek pembangunan Pelabuhan Patimban dipandang akan memberikan keuntungan ekonomi bagi Jepang. Pertama, bantuan pinjaman proyek ini bersifat mengikat yang mana pihak Jepang juga akan turut andil dalam pengerjaan

Pelabuhan Patimban (Arieza, 2017). Pembangunan Pelabuhan Patimban merupakan salah satu proyek dengan skema kerangka kerja sama *Special Terms for Economic Partnership (STEP)*. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan konstruksi terminal (Paket 1) dilakukan oleh perusahaan patungan antara *Penta-Ocean Construction Co., Ltd.* (46%), *TOA Corporation* (19%), *Rinkai Nissan Construction Co., Ltd.* (5%), PT PP (Persero) Tbk (Indonesia) (18%), dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (Indonesia) (12%) (*Penta-Ocean Construction Co.*, 2018). Kedua, Pelabuhan Patimban akan mendukung efisiensi rantai nilai produk Jepang yang diproduksi di Indonesia. Pelabuhan Patimban akan mendukung arus dari dan ke kawasan industri di Karawang dan Bekasi yang merupakan rumah bagi sejumlah pabrik otomotif, barang elektronik, mesin, dan komponen manufaktur milik Jepang (Jakarta Post, 2016). Adapun ekspor perdana melalui Pelabuhan Patimban adalah 140 unit mobil (Toyota, Daihatsu, Suzuki) yang diekspor menuju Brunei Darussalam (Kementerian Perhubungan Republik, 2020).

Pemerintah Jepang melalui JICA juga memberikan bantuan pada Proyek Pelabuhan Patimban. Bantuan pembangunan pelabuhan tersebut krusial secara ekonomi dalam rangka pelaksanaan ekspor infrastruktur Jepang di kawasan Asia Tenggara (Kikuchi & Unzaki, 2019). Tidak hanya itu, pembangunan proyek ini dilihat oleh pemerintah Jepang juga sebagai bentuk implementasi dari visi *Free and Open Indo-Pacific (FOIP)* (*Ministry of Foreign Affairs of Japan*, 2023b).

Simpulan

Kepemimpinan Shinzo Abe di Jepang pada periode 2012-2020 memperkenalkan strategi *Abenomics* sebagai sebuah penawar dari masalah ekonomi yang dialami oleh Jepang. Kebijakan *Abenomics* tidak hanya membawa implikasi pada kebijakan dalam negerinya saja, namun juga luar negeri termasuk praktik diplomasi internasionalnya. Kehadiran diplomasi ekonomi dalam hubungan internasional bukan merupakan sebuah fenomena baru. Saat ini, diplomasi ekonomi dipraktikkan secara umum dan diintegrasikan dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Meskipun demikian, penelitian ini menegaskan bahwa praktik diplomasi ekonomi yang dijalankan oleh negara maju seperti Jepang sudah semakin komprehensif dan melibatkan berbagai aktor.

Penelitian ini menggarisbawahi bahwa Jepang telah menggunakan tiga pilar diplomasi ekonominya. Diplomasi komersial, diplomasi perdagangan, dan bantuan

ekonomi/pembangunan dilaksanakan dalam rangka mencapai kepentingan ekonominya untuk melaksanakan ekspor infrastruktur ke Indonesia. Kementerian Luar Negeri bukanlah satu-satunya aktor yang terlibat. Shinzo Abe sebagai kepala negara menggunakan posisi strategisnya sebagai salah satu aktor dalam pelaksanaan diplomasi komersial. Tidak hanya itu, pemerintah Jepang di bawah Shinzo Abe memobilisasi berbagai perangkat yang ada termasuk Kementerian Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata, JETRO, dan JICA agar Jepang dapat mencapai kepentingan ekonominya di Indonesia dalam konteks ekspor infrastruktur. Kemudian, bantuan ekonomi yang dialokasikan oleh pemerintah Jepang kepada Indonesia berkaitan erat dengan pendanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Konstruksi proyek infrastruktur Indonesia yang didanai oleh pinjaman luar negeri Jepang sering kali pelaksanaannya dilaksanakan oleh *joint venture* atau konsorsium perusahaan Jepang dan Indonesia.

Jepang sebagai negara maju di kawasan Asia memberikan pelajaran untuk Indonesia terkait bagaimana diplomasi ekonomi dijalankan secara komprehensif dalam rangka mencapai kepentingan negara. Kebangkitan Indonesia dalam politik ekonomi internasional semakin diperhitungkan. Oleh karena itu, penelitian terkait pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia perlu untuk dikaji lebih mendalam.

Daftar Pustaka

- Alonso, J. A., & Glennie, J. (2015). What Is Development Cooperation? In *2016 Development Cooperation Forum Policy Briefs* (Issue 1). https://www.un.org/en/ecosoc/newfuncnt/pdf15/2016_dcf_policy_brief_no.1.pdf
- Anam, S., & Ristiyani. (2018). Kebijakan Belt and Road Initiative (BRI) Tiongkok pada Masa Pemerintahan Xi Jinping. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 14(2), 217–236. <https://doi.org/10.26593/jihi.v14i2.2842.217-236>
- APKASI. (2017, Januari 16). *Bawa 30 CEO, PM Jepang Abe Minat Investasi di Bidang Infrastruktur*. Diambil dari <https://apkasi.org/internasional/bawa-30-ceo-pm-jepang-abe-minat-investasi-di-bidang-infrakstruktur/>
- Arieza, U. (2017, November 13). *Kucurkan Dana Rp. 14,19 Triliun, Jepang Cover 83% Ongkos Pembangunan Pelabuhan Patimban*. Diambil dari <https://economy.okezone.com/read/2017/11/13/320/1813274/kucurkan-dana-rp14-19-triliun-jepang-cover-83-ongkos-pembangunan-pelabuhan-patimban>
- Armstrong, S. (2021). Economic Diplomacy and Economic Security under Abe. *Asian Economic Policy Review*, 16(2), 283–299. <https://doi.org/10.1111/aepr.12335>
- Arystankulova, G. (2018). Economic Diplomacy-Important Component of Foreign Policy of Modern State. *The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication-TOJDAC*, 2864–2873. <https://doi.org/10.7456/1080SSE/365>

- Asian Development Bank (ADB). (2017). *Meeting Asia's Infrastructure Needs*. <https://doi.org/10.22617/FLS168388-2>
- Bakry, U. S. (2019). *Ekonomi Politik Internasional Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- BBC. (2011, February 14). *China overtakes Japan as world's second-biggest economy*. Diambil dari <https://www.bbc.com/news/business-12427321>
- Bhimasena Power. (2016). *Shareholders*. Diambil dari <https://www.bhimasenapower.co.id/shareholder/9/jpower/3>
- Cabinet Secretariat of the Republic of Indonesia. (2016, 27 Mei). *President Jokowi, Japanese PM Abe Discuss Patimban Seaport Project*. Diambil dari <https://setkab.go.id/en/president-jokowi-japanese-pm-abe-discuss-patimban-seaport-project/>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches (4th ed.)*. Thousand Oaks: Sage Publication.
- Detikfinance. (2013, October 6). *Chairul Tanjung, Sofjan Wanandi, dan Suryo Sulisto Bertemu PM Jepang*. Diambil dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-2379338/chairul-tanjung-sofjan-wanandi-dan-suryo-sulisto-bertemu-pm-jepang>
- Embassy of Japan in Indonesia. (2017, June 5). *Kunjungan Kehormatan Y.M. Bapak Jusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia kepada Perdana Menteri Jepang, Bapak Shinzo ABE*. Diambil dari https://www.id.emb-japan.go.jp/news17_13.html
- Envall, H. D. P. (2015). *Japanese Diplomacy: The Role of Leadership*. New York: State University of New York Press.
- Gideon, A. (2016, May 27). *Indonesia dan Jepang Terus Kembangkan Kerja Sama Ekonomi*. Diambil dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2517183/indonesia-dan-jepang-terus-kembangkan-kerja-sama-ekonomi>
- Gultom, D. (2020). *Perjanjian Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Peluangnya bagi Indonesia dan Langkah Pemanfaatannya Sebuah Perspektif Internal*. In *Center for Indonesian Policy Studies*. Center for Indonesian Policy Studies. <https://doi.org/10.35497/328748>
- Hoshiro, H. (2022). *Japan's Foreign Aid Policy: Has It Changed? Thirty Years of ODA Charters*. *Social Science Japan Journal*, 25(2), 297–330. <https://doi.org/10.1093/ssjj/jyac010>
- IMF. (2020). *Japan: Selected Issues*. <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2020/02/07/Japan-Selected-Issues-49033>
- Jain, P. (2016). *Japan's foreign aid old and new contests*. *Pacific Review*, 29(1), 93–113. <https://doi.org/10.1080/09512748.2015.1066415>
- Japan Bank for International Cooperation. (n.d.). *JBIC PROFILE Role and Function*. Diambil dari <https://www.jbic.go.jp/en/about/image/jbic-brochure-english.pdf> pada 25 September 2023
- Japan International Cooperation Agency. (n.d.). *Special Terms for Economic Partnership (STEP)*. Diambil dari https://www.jica.go.jp/english/activities/schemes/finance_co/step/index.html pada 25 September 2023
- Japan International Cooperation Agency. (2023, July 28). *Penandatanganan Kontrak Paket 2 dan Paket 3 dibawah Pinjaman Lunak ODA Jakarta Sewerage Development Project (Zone 1) (IP-581)*. Diambil dari

- https://www.jica.go.jp/indonesian/overseas/indonesia/information/topics/2023/1515988_25435.html
- JETRO. (2022a). *JETRO Worldwide*. Diambil dari <https://www.jetro.go.jp/en/jetro/worldwide.html>
- JETRO. (2022b). *Research & Reports*. Diambil dari <https://www.jetro.go.jp/indonesia/npr.html>
- Jiang, Y. (2019). Competitive partners in development financing: China and Japan expanding overseas infrastructure investment. *Pacific Review*, 32(5), 778–808. <https://doi.org/10.1080/09512748.2019.1569117>
- JICA. (n.d.). *ODA Loan Project DATA*. Diambil dari https://www2.jica.go.jp/en/yen_loan/index.php/module/search?anken_name=&area1=0&area2=0&area3=0&country1=12&country2=0&country3=0§ion1=0§ion2=0§ion3=0&industry1=0&industry2=0&industry3=0&shotatsu_kubun=0&from_year=2012&to_year=2020¤cy=jpy pada 29 September 2023
- Kameda, M. (2015, May 22). *Abe announces \$110 billion in aid for “high-quality” infrastructure in Asia*. Diambil dari <https://www.japantimes.co.jp/news/2015/05/22/business/abe-announces-110-billion-in-aid-for-high-quality-infrastructure-in-asia/#.WfneKjufLIU>
- Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. (2014a). *Press Release 2014*. Diambil dari <https://www.id.emb-japan.go.jp/news2014.html>
- Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. (2014b, Nov. 20). *Kunjungan kehormatan Duta Besar Tanizaki Yasuaki kepada Bapak Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, Wakil Presiden RI*. Diambil dari https://www.id.emb-japan.go.jp/news14_32.html
- Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. (2014c, Des. 1). *Kunjungan kehormatan Duta Besar Tanizaki Yasuaki kepada Bapak Sofyan Djalil, Menko Perekonomian RI*. Diambil dari https://www.id.emb-japan.go.jp/news14_40.html
- Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. (2014d, Des. 9). *Kunjungan kehormatan Duta Besar Tanizaki Yasuaki kepada Bapak Prof. Dr. Bambang Permadi, Menteri Keuangan RI*. Diambil dari https://www.id.emb-japan.go.jp/news14_45.html
- Kedutaan Besar Jepang di Indonesia. (2015). *Press Release 2015*. Diambil dari <https://www.id.emb-japan.go.jp/news2015.html>
- Keidanren. (2013, April 16). *Proposals for Redefining of Trade Strategy*. Diambil dari https://www.keidanren.or.jp/en/policy/2013/034_proposal.html
- Keidanren. (2015, November 17). *Towards Strategic Promotion of the Infrastructure Export*. Diambil dari <https://www.keidanren.or.jp/en/policy/2015/105.html>
- Keidanren. (2020, November 15). *Chairman Nakanishi’s Comment on the Signature of the RCEP*. Diambil dari <https://www.keidanren.or.jp/en/speech/comment/2020/1115.html>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Kontraktor Proyek MRT Jakarta Fase 1 dan Fase 2*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2021/03/Foto-Kontraktor-Proyek-MRT-Jakarta-Fase-1-dan-Fase-2.pdf>
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2017). *Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Triwulan III 2017*. https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/LKPPHLN/Laporan%20Kinerja%20Pelaksanaan%20Pinjaman%20

[Dan%20Atau%20Hibah%20Luar%20Negeri%20Edisi%20TW%20III%20Tahun%202017.pdf](#)

- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2019). *Laporan kinerja pelaksanaan pinjaman dan/hibah luar negeri, Triwulan I Tahun 2019*. https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/LKPPHLN/Buku%20I%20LKP-PHLN%20TW%20I%20TA%202019.pdf
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). (2020). *Laporan Kinerja Pelaksanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri; Edisi Triwulan IV 2020*. https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/migrasi-data-publikasi/file/LKPPHLN/Laporan%20Kinerja%20Pelaksanaan%20Pinjaman%20dan%20atau%20Hibah%20Luar%20Negeri%20-%20Triwulan%20IV%202020.pdf
- Kementerian Perhubungan Republik. (2020, December 20). *Mulai Beroperasi, Pelabuhan Patimban Langsung Layani Ekspor Perdana*. Diambil dari <https://dephub.go.id/post/read/mulai-beroperasi,-pelabuhan-patimban-langsung-layani-ekspor-perdana>
- Kikuchi, T., & Unzaki, S. (2019). *Front Matter*. In *Japanese Infrastructure Investment in Southeast Asia*. S. Rajaratnam School of International Studies. <http://www.jstor.org/stable/resrep20020.1>
- Lee, D., & Hocking, B. (2018). *Economic Diplomacy* (Vol. 1). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.384>
- Masuo, C. T. (2020). *Japan's Global Diplomacy to China's Belt and Road Initiative*. In A. Lukin (Ed.), *The "Roads" and "Belts" of Eurasia* (pp. 169–191). Singapura: Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-0856-1_7
- METI Japan. (2021). *Japanese Government Supporting Tools for Energy Infrastructure in the Indo-Pacific* (Toolkit. Ministry of Economy, Trade and Industry Agency for Natural Resources and Energy). <https://www.enecho.meti.go.jp/category/others/jucep/data/toolkit.pdf>
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2013a, January 18). *Prime Minister Abe's Visit to Southeast Asia (Overview and Evaluation)*. Diambil dari https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/pmv_1301/overview.html
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2015, May 21). *Announcement of "Partnership for Quality Infrastructure: Investment for Asia's Future."* Diambil dari https://www.mofa.go.jp/policy/oda/page18_000076.html
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2016, May 27). *G-7 Ise-Shima Summit: Overview of the Outreach Meeting*. Diambil dari https://www.mofa.go.jp/ecm/ec/page4e_000457.html#section19
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2020). *Eighth Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Ministerial Meeting*.
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2020, August 25). *Eighth Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Ministerial Meeting*. Diambil dari https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_002884.html
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2023a). *Japan-Indonesia Relations (Archives)*. Diambil dari <https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/indonesia/archives.html>

- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2023b). *New Plan for a “Free and Open Indo-Pacific (FOIP)” Items of Cooperation*. Diambil dari <https://www.mofa.go.jp/files/100478784.pdf>
- MLIT Japan. (2017). *White Paper on Land, Infrastructure, Transportation, and Tourism in Japan 2017*. Diambil dari <https://www.mlit.go.jp/en/statistics/white-paper-mlit-2017.html>
- MOFA Japan. (2013a). *Diplomatic Bluebook 2013*. <https://www.mofa.go.jp/files/000019036.pdf>
- MOFA Japan. (2013b, October 7). *Japan-Indonesia Summit Meeting*. Diambil dari https://www.mofa.go.jp/region/page23e_000005.html
- MOFA Japan. (2013c, December 13). *Japan-Indonesia Summit Meeting*. Diambil dari https://www.mofa.go.jp/region/page22e_000050.html
- MOFA Japan. (2014, August 12). *Foreign Minister Kishida’s Visit to Indonesia*. Diambil dari https://www.mofa.go.jp/s_sa/sea2/id/page22e_000489.html
- MOFA Japan. (2015, April 22). *Japan-Indonesia Summit Meeting*. Diambil dari https://www.mofa.go.jp/s_sa/sea2/id/page4e_000240.html
- MOFA Japan. (2017a). *Japan’s Foreign Policy to Promote National and Worldwide Interests*. <https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2017/html/chapter3/c030302.html>
- MOFA Japan. (2017b, January 15). *Japan-Indonesia Summit Meeting*. Diambil dari https://www.mofa.go.jp/s_sa/sea2/id/page4e_000576.html
- MOFA Japan. (2017c, November 12). *Japan-Indonesia Summit Meeting*. Diambil dari https://www.mofa.go.jp/s_sa/sea2/id/page3e_000782.html
- MOFA Japan. (2020, August 25). *Eighth Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Ministerial Meeting*. Diambil dari https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_002884.html
- MOFA Japan. (2021). *Japan’s Economic Diplomacy to Promote National and Global Interests*. Diambil dari https://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/2021/en_html/chapter3/c030302.html
- Naray, O. (2008). *Commercial Diplomacy: A Conceptual Overview*. Diambil dari https://www.researchgate.net/publication/255601282_Commercial_Diplomacy_A_Conceptual_Overview
- Naray, O., & Bezençon, V. (2017). Management and Business Research on Commercial Diplomacy: Examining Trends and Themes. *The International Trade Journal*, 31(4), 332–359. <https://doi.org/10.1080/08853908.2017.1291379>
- New York Times. (2013, May 17). *Abe Unveils Plan for Exports and Investment*. Diambil dari <https://www.nytimes.com/2013/05/18/business/global/abe-unveils-strategy-of-exports-and-investment.html>
- OECD. (2017). *OECD Economic Outlook: Japan*. https://doi.org/10.1787/eco_outlook-v2017-2-29-en
- OECD. (2019). *OECD Economic Surveys: Japan 2019*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1787/fd63f374-en>
- Official Website of the Prime Minister of Japan and His Cabinet. (2013a). *Japan Revitalization Strategy -JAPAN is BACK*. https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/en_saikou_jpn_hon.pdf

- Official Website of the Prime Minister of Japan and His Cabinet. (2013b, January 28). *Policy Speech by Prime Minister Shinzo Abe to the 183rd Session of the Diet*. Diambil dari https://japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201301/28syosin_e.html
- Official Website of the Prime Minister of Japan and His Cabinet. (2013c, October 7). *Keynote Address by Prime Minister Shinzo Abe at the APEC CEO Summit 2013*. Diambil dari https://japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201310/07koen_e.html
- Official Website of the Prime Minister of Japan and His Cabinet. (2014, June 14). *Policy Speech by Prime Minister Shinzo Abe to the 186th Session of the Diet*. Diambil dari https://japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201401/24siseihousin_e.html
- Official Website of the Prime Minister of Japan and His Cabinet. (2019). *Follow-up on the Growth Strategy*. <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/fu2019en.pdf>
- Okano-Heijmans, M. (2011). Conceptualizing economic diplomacy: the crossroads of international relations, economics, IPE and diplomatic studies. *The Hague Journal of Diplomacy*, 6(1–2), 7–36. <https://doi.org/10.1163/187119111X566742>
- Okano-Heijmans, M. (2013). *Economic Diplomacy Japan and the Balance of National Interests* (J. Mellisen, Ed.). Leiden: Martinus Nijhoff Publishers.
- Okano-Heijmans, M. (2016). Economic Diplomacy. In C. M. Constantinou, P. Kerr, & P. Sharp (Eds.), *The Sage Handbook of Diplomacy* (pp. 552–563). London: SAGE Publications.
- Ostrander, I. & Rider, T. J. (2019). Presidents Abroad: The Politics of Personal Diplomacy. *Political Research Quarterly*, 72(4), 835–848.
- Prime Minister of Japan and His Cabinet. (2014, June 24). *Japan Revitalization Strategy – Revised in 2014: Japan’s Challenge for the Future*. Diambil dari <https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/honbunEN.pdf>
- Penta-Ocean Construction Co., Ltd. (2018, July 17). *Award of Construction Contract for Large-Scale Port Construction in Indonesia*. Diambil dari <https://www.penta-ocean.co.jp/english/updates/2018/180717.html>
- Putri, S. Y. (2020). Diplomasi Komersial Jepang ke Indonesia Melalui Perusahaan Multinasional Jepang di Indonesia. *Jurnal PIR*, 4(2), 151–165.
- PwC Indonesia. (2016). *Indonesian Infrastructure Stable foundations for growth*. <https://www.pwc.com/id/en/cpi/asset/new-version/indonesian-infrastructure-stable-foundations-for-growth.pdf>
- PwC Singapore. (2017). *Understanding infrastructure opportunities in ASEAN*. <https://www.pwc.com/sg/en/publications/assets/cpi-mas-1-infrastructure-opportunities-in-asean-201709.pdf>
- Raco, C. R. S. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter, dan Keunggulan*. Jakarta: Grasindo.
- Sabaruddin, S. S. (2017). Grand Design Diplomasi Ekonomi Indonesia: Sebuah Pendekatan Indeks Diplomasi Ekonomi. *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 12(1), 69–90. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/JurnalIlmiahHubunganInternasional/article/view/2545>
- Sakurai, T. (2007). *JETRO and Japan’s Postwar Export Promotion System: Messages for Latin American Export Promotion Agencies*. <https://doi.org/10.20561/00038035>
- Sekretaris Kabinet Republik Indonesia. (2015, March 22). *Disambut Udara Dingin, Presiden Jokowi Tiba di Tokyo Untuk Kunjungan Kenegaraan*. Diambil dari

<https://setkab.go.id/disambut-udara-dingin-presiden-jokowi-tiba-di-tokyo-untuk-kunjungan-kenegaraan/>

- Solís, M., & Urata, S. (2018). Abenomics and Japan's Trade Policy in a New Era. *Asian Economic Policy Review*, 13(1), 106–123. <https://doi.org/10.1111/aepr.12205>
- Sulaiman, Y. (2023). Japan-Indonesia Relations: Counterbalancing Power Play and the Role of Japan. In Srabani Roy Choudhury (Ed.) *Japan and Its Partners in the Indo-Pacific: Engagements and Alignment*. New York: Routledge.
- Suzuki, S. (2021). Economic statecraft, interdependence, and Sino-Japanese 'rivalry.' *The Pacific Review*, 35(5), 1–21. <https://doi.org/10.1080/09512748.2021.1941209>
- The Jakarta Post. (2017, November 14). Japan signs Rp. 14,2t loan agreement for Patimban port project. *The Jakarta Post*. Diambil dari <https://www.thejakartapost.com/news/2017/11/14/japan-signs-rp-14-2t-loan-agreement-for-patimban-port-project.html>
- The World Bank. (2019). *World Gross Domestic Product 2019*. Diambil dari https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?most_recent_value_desc=true
- Wakatabe, M. (2015). *Japan's Great Stagnation and Abenomics*. New York: Palgrave Macmillan.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th Eds.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Yoshimatsu, H. (2018). New Dynamics in Sino-Japanese Rivalry: Sustaining Infrastructure Development in Asia. *Journal of Contemporary China*, 27(113), 719–734. <https://doi.org/10.1080/10670564.2018.1458059>
- Yoshimatsu, H. (2021). *Japan's Asian Diplomacy: Power Transition, Domestic Politics, and Diffusion of Ideas* (M. Beeson, Ed.). Singapura: Palgrave Macmillan Singapore. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/978-981-15-8338-4>
- Yohsino, N. & Taghizadeh-Hesary, F. (2015). Causes and Remedies for Japan's Long-Lasting Recession: Lessons for the People's Republic of China. *ADB Working Paper 554*. Tokyo: Asian Development Bank Institute.
- Zhao, H. (2018). China–japan compete for infrastructure investment in southeast asia: Geopolitical rivalry or healthy competition? *Journal of Contemporary China*, 28(118), 558–574. <https://doi.org/10.1080/10670564.2018.1557946>